

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI  
(Studi Kasus : Di Kecamatan Cibadak)**

**Muhammad Reno Gunarsa**

Program Studi Adminitansi Publik, Fakultas Ilmu Administasi dan Humaniora  
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa barat

[muhammad.reno.g@gmail.com](mailto:muhammad.reno.g@gmail.com)

**ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus : Kecamatan Cibadak). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Program keluarga harapan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Program PKH merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan tunai bersyarat *Conditional Cash Transfers (CCT)* pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya, pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu masyarakat miskin, kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Program keluarga Harapan (PKH)

---

**PENDAHULUAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial untuk meminimalisir permasalahan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan adalah permasalahan pokok di negara berkembang termasuk Indonesia, walaupun hampir tidak ada negara yang benar-benar terbebas dari kemiskinan. Negara Maju dan kaya, mengalami juga kemiskinan meski tidak besar seperti negara berkembang. Sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil diberbagai Negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program subsidi bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin saat pemerintah melakukan

penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). PKH lebih di maksud sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin bukan membuat malas masyarakat miskin tapi untuk membuat masyarakat lebih produktif yang nantinya tidak bergantung pada bantuan pemerintah lagi

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain seperti Mexico, Brazil dan Filipina, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun tujuan dari PKH ini sebagai program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), program ini dalam jangka pendek mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang memutus rantai kemiskinan. ada banyak daerah yang menerima bantuan PKH termasuk di Kabupaten Sukabumi.

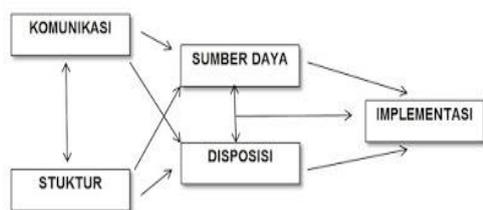
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi PKH yang sudah berjalan, serta memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai referensi untuk bisa di kembangkan lagi

## KAJIAN PUSTAKA

Menurut Goggin et al.(1990), kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintahan fundamental (pusat) kepada pemerintahan daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

1. Isi Kebijakan (*the content of the policy message*)
2. Format Kebijakan (*the from of the poliy message*)
3. Refutasi aktor (*the reputation of the communicators*)

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure) Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.



Gambar Teori George C. Edwards III

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dan dari UPPKH kecamatan

Cibadak. Metode penelitian Kualitatif yang digunakan merupakan cara utama peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sugiyono (2004:34 ) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Teori yang digunakan adalah Teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat variabel dalam kebijakan public yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), Sikap (Dispositions) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure).

## PEMBAHASAN

### Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano, sebagaimana di kutip keban (2004, h.3), mengatakan administasi publik adalah proses di mana sumberdaya dan personal publik diorganisasikan dan di koordinasikan untuk memformulasikan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam dalam sebuah kebijakan publik “

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program - program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan”. Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah..

### Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plato (1988) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik

atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plato dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mandaygunakan berbagai instrument yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program - program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan”. Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah

### **Implementasi kebijakan**

Implementasi merupakan langkah dalam proses kebijakan, banyak kebijakan yang di buat oleh pemerintah tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap negara tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) Menjelaskan Bahwa :

*“Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.*

Esensi utama dari Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau didamusnahkan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Model implementasi kebijakan

menurut pandangan Edwards III (1980), dipengaruhi empat variabel, yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan kemudian struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

### **Program Keluarga Harapan**

PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya, PKH berada di bawah koordinasi tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

Program Keluarga Harapan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Sosial dan Pemerintah Daerah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gorontalo.

Program PKH berbeda dengan bantuan tunai langsung (BLT), karena dalam PKH persyaratannya lebih ketat yaitu lebih kepada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) terutama anak-anak. “PKH lebih diutamakan untuk anak-anak mulai dalam kandungan sampai anak usia sekolah yang tidak mampu bersekolah,” PKH sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai Negara khususnya Negara-negara amerika latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya CCT, yang di terjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Mukhtar Sarman, 2000).

## **Implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan**

Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Duun, sebagaimana dikutip pasolong (2010). Mengatakan kebijakan public adalah sebuah pilihan yang dibuat oleh pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, perkotaan dan lain-lain. Dalam mata kebijakan public, adanya Program keluarga Harapan ini terjadi karena adanya kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Sukabumi.

**Tabel 1.3**

**Jumlah penerima PKH di Kecamatan Cibadak selama 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan jumlah**

Tahun	Jumlah penerima	Jumlah Penduduk
2016	2.146	106.876
2017	3.219	107.008
2018	3.854	107.117

*Sumber : Kantor kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*

Tujuan Umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative mendukung peningkatan kesejahteraan.

Seczra kusus tujuan Program Keluarga harapan (PKH).

Proses kebijakan membutuhkan berbagai kegiatan dari penentuan kebijakan mana kebijakan yang akan di ambil, kebijakan juga bisa mengadofsi kebijakan yang pernah di dilakukan, atau memuat kebijakan yang baru setelah pembuatan kebijakan kemudian kebijakan itu di evaluasi.

Dalam Implementasi pelaksanaan kebijakan yang di praktikkan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini juga dilakukan agar tujuan dari sebuah kebijakan dapat di laksanakan dengan waktu tertentu. PKH juga menggunakan sarana yang ada untuk pelaksanaannya

Tujuan umum dari PKH ini adalah untuk mengurangi beban RTSM, mengurangi jumlah masarakat miskin, memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan sumberdaya manusia.

Secara khusus tujuan PKH adalah Meningkatkan stastus social RTSM.

## **Fakor-faktor kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

### **Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan Implementasi program keluarga harapan di Kabupaten Sukabumi (studi kasus di kecamatan cibadak), ditemukan beberapa hal yang akan menghambat yakni belum optimalnya program PKH dalam bidang pendidikan masih ada orang tua siswa yang acuh terhadap anaknya, bagaimana kondisi anaknya disekolah hanya tahu menerima bantuan saja tapi tidak menjalankan sesuai dengan yang ada dibuku pedooman penerima PKH dan yang sering terjadi uang PKH yang diberikan untuk keperluan sekolah dipakai keperluan sehari hari banyak kasus seperti ini. Faktor pengambat lain yakni tidak ada nya kantor tetap PKH hal ini berdamak sangat besar terhadap kinerja para koordinator dan pendamping PKH yang harus mengontrak rumah untuk dijadikan kantor dan sering kali berpindah pindah kontrakan

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana.

c. Implementasi akan berjalan efektif

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat

karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program

### III. KESIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sudah berjalan secara dengan baik walau masih ada kekurangan.

1. Pendamping juga selalu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data, verifikasi komitmen dan pembayaran bantuan yang dilakukan secara rutin yaitu setiap 3 bulan.
2. Jumlah RTSM peserta PKH di Kecamatan Cibadak yaitu 1498 peserta dan jumlah anak yang terdaftar dalam layanan pendidikan adalah 2400 anak.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH pendidikan dilihat dari tingkat *implemetability* yaitu faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Faktor isi kebijakan masih besar pengaruhnya terhadap implemetasi kebijakan dikarenakan faktor ini erat kaitannya dengan Dengan digulirkan Program Keluarga Harapan ini telah membuka kesadaran RTSM di Kecamatan Cibadak bahwa miskin itu tidak baik. Kesadaran para RTSM terbukti dengan selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar rajin ke sekolah. PKH pendidikan memberikan dampak besar terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak dari RTSM di layanan pendidikan. Karena pendamping selalu mengontrol tingkat kehadiran anak-anak di sekolah melalui verifikasi absen yang telah dilakukan oleh guru masing-masing sekolah.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH pendidikan di Kecamatan Cibadak diantaranya :

- a. Proses verifikasi di layanan pendidikan yang kurang bersahabat
- b. Koordinasi lintas sektoral yang belum berjalan optimal c) terkadang pihak sekolah kewalahan untuk memverifikasi karena tidak ada data yang dipegang
- c. Tidak adanya pelaporan mengenai penerima program dari pendamping kepada SKPD setempat
- d. Belum tersedianya Kantor Sekretariat UPPKH Kecamatan
- e. Belum tersedianya buku pedoman operasional PKH bagi pemberi layanan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mustari, Nuryanti. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik pemahaman teoritis empiris*. Makasar: Membumi Publishing
- Rozi, Akhmad. 2011. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah Laut*. Tanah Laut: Universitas Lambung Mangkurat
- Iqbal , Hasbi. 2008. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kudus*. Kudus: Universitas Mulia Kudus
- Sugiono. 2008. *Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif dan P&D*, Alfabeta. Bandung.
- Syamsir, Nurfahira. 2011. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalema Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddi
- Rafiudin, Muhamad. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*. Lebak: Universitas Sultan Ageng Titayasa
- Suleman, Syahputra Adisanjaya. 2016. *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Dheby, Clara dkk. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Destiani, Ida Yunani. 2014. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapa (PKH) dalam meningkatkan taraf kesehatan oleh UPPKH Kecamatan di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Pangandaran
- Tlonaen, Yudid B.S dkk. 2014. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Malang: Universitas Tribhuwana Tunggaldewi